

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



PAJAK DAERAH



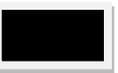
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP : 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan : 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi : 01 MARET 2021



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP.3. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas.4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2)5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi.2. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI.3. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi.4. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Komputer2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.2. Berkas yang diterima tidak lengkap.	

NO	Aktivitas	PELAKSANA					Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		WP	Pengelola Pajak	Pengelola Aplikasi Pajak	Kasubbid Penetapan dan perhitungan	Kabid pendapatan					
		3	4		5		7	8	9		
1	Wajib Pajak mengisi sesuai dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) secara jelas dan benar untuk menghitung pajak berdasarkan omset yang diperoleh dan disampaikan ke Pelayanan Pajak.							Belangko dan kelengkapan berkas	8 Menit	Dokumen	
2	Pelayanan Pajak menerima, memeriksa dan membukukan berkas wajib pajak jika lengkap diserahkan ke petugas Pengelola Pajak, jika tidak diserahkan kembali ke wajib Pajak.							Dokumen	10 Menit	Dokumen	
3	Pengelola Pajak menghitung dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) kemudian dinaikkan ke Kabid Pendapatan.							Dokumen	10 Menit	Dokumen	
4	Persetujuan permohonan penetapan kepada kabid Pendapatan							Dokumen	5 Menit	Dokumen	
5	Kasubbid. Penetapan dan Perhitungan menandatangani SKPD dan menyerahkan ke pengelola pajak							Dokumen	8 Menit	Dokumen	
6	WP menerima berkas dari pengelola pajak dan menyerahkan uang pembayaran pajak Hotel beserta SKPD ke Bendahara Penerimaan atau Pihak lain yang ditunjuk.							Dokumen	15 Menit	Dokumen	
7	Bendahara Penerima menerima pembayar pajak dan memeriksa SSPD dan menandatangani dan menstempel SSPD kemudian menyerahkan SSPD lembar 1 wajib pajak, lembaran 2 bendahara penerima, lembaran 3 pengelola aplikasi Pajak, lembaran 4 arsip.										
8	wajib pajak menerima bukti pelunasan pajak daerah.							Dokumen	5 Menit	Dokumen	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">6. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.7. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP.8. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas.9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2)10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">5. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi.6. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI.7. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi.8. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Komputer2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">3. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.4. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
11. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 12. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 13. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	9. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 10. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 11. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 12. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
5. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 6. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
16. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 17. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 18. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	13. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 14. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 15. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 16. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
7. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 8. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
21. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 22. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 23. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	17. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 18. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 19. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 20. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
9. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 10. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
26. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 27. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 28. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	21. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 22. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 23. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 24. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
11. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 12. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
31. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 32. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 33. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	25. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 26. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 27. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 28. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
13. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 14. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
36. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 37. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 38. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	29. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 30. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 31. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 32. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
15. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 16. Berkas yang diterima tidak lengkap.	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Nomor SOP	: 800/52.a/SOP-PAJAK DAERAH/BPPRD/2021
Tanggal Pembuatan	: 15 FEBRUARI 2021
Tanggal Revisi	: 01 MARET 2021



SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN /PPJ NON PLN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
41. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 42. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP. 43. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas. 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2) 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	33. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi. 34. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI. 35. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi. 36. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Peralatan Komputer 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
17. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan. 18. Berkas yang diterima tidak lengkap.	

